

ANALISIS REGULASI IZIN PIRT DAN SOLUSI STRATEGIS PENGURUSAN IZIN BPOM UNTUK KELANGSUNGAN USAHA MINUMAN SIAP MINUM PADA CV WINNA SARI

M. Mirza Pratama¹, Muhammad Imdad Fadlillah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹mirzha.jo@gmail.com, ²imdadfadlillah2@gmail.com

Received: 07-07-2025

Revised: 14-09-2025

Approved: 25-10-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi izin PIRT dan kendala pengurusan izin BPOM serta merumuskan solusi strategis yang mendukung keberlangsungan usaha minuman siap minum pada CV Winna Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Winna Sari telah memenuhi perizinan PIRT namun belum mampu melanjutkan pengurusan izin BPOM karena keterbatasan fasilitas produksi, ketidaksiapan dokumen administratif, serta kurangnya pemahaman teknis terhadap prosedur regulasi. Di sisi lain, legalitas BPOM dinilai berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan izin PIRT dan BPOM bukan hanya kewajiban administratif, tetapi strategi penting bagi keberlangsungan UMKM; oleh karena itu, perbaikan sarana produksi, penyusunan dokumen standar, serta pendampingan teknis menjadi solusi strategis yang diperlukan bagi CV Winna Sari dan UMKM sejenis.

Kata Kunci: PIRT, BPOM, Legalitas Usaha, UMKM, Keberlanjutan Bisnis

PENDAHULUAN

UMKM pada sektor makanan dan minuman di Indonesia berperan besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Berdasarkan data, kontribusi UMKM mencapai sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor ini (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Di Indonesia terdapat lebih dari 4 juta UMKM di bidang makanan dan minuman yang saat ini beroperasi, dengan laju pertumbuhan yang cukup pesat. Kondisi ini semakin menonjol sejak masa pandemi COVID-19, ketika banyak pelaku usaha mulai beralih ke platform penjualan daring (Neng Frida, 2020). Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses modal dan persaingan di pasar, UMKM pada sektor makanan dan minuman tetap berupaya berinovasi. Mereka meluncurkan produk baru sekaligus memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar (Krisna, 2024). Peran pemerintah melalui beragam program pelatihan dan fasilitas pembiayaan turut memperkuat keberadaan UMKM di sektor makanan dan minuman di Indonesia (Perdana, 2024). Pertumbuhan industri rumah tangga yang pesat mendorong para produsen untuk berlomba menciptakan berbagai inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan, hingga harga jual. Semua inovasi ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Namun, keamanan dan legalitas produk yang dihasilkan tetap menjadi hal penting. Untuk memastikan konsumen tidak dirugikan, mereka perlu memahami konsep Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

PIRT adalah sertifikasi yang diberikan kepada industri rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Sertifikasi ini khusus diberikan pada produk pangan olahan dengan risiko rendah. Dengan demikian, izin PIRT merupakan bentuk jaminan dari pihak berwenang terhadap kesehatan dan keamanan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (Hermanu & Saryana, 2016). Keberadaan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan BPOM

(Badan Pengawas Obat dan Makanan) memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan usaha di sektor pangan Indonesia (Windiasasri et al., 2024). PIRT memberikan izin pada produk makanan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, dengan tujuan memastikan standar keamanan dan kualitas terpenuhi sehingga menumbuhkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, BPOM bertugas mengawasi serta mengatur peredaran makanan dan obat-obatan di pasar, melakukan pengujian mutu, dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi (Husna, 2022). Berkat dukungan dari kedua lembaga tersebut, pelaku usaha mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produknya, sekaligus berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Anggreini et al., 2024). Pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman di Indonesia sering menghadapi kendala dalam mengurus izin BPOM maupun PIRT, yang kemudian menjadi hambatan utama bagi mereka dalam memperluas akses ke pasar yang lebih luas (Aprilianti & Amanta, 2020).

Laporan dari media menyebutkan bahwa prosedur pengajuan izin yang berbelit-belit dan lamanya proses, ditambah minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, UMKM penghasil makanan tradisional kerap menemui kesulitan untuk menyesuaikan dengan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan, serta terbebani biaya tinggi dalam pelaksanaan uji laboratorium (Budiarto et al., 2018). Legalitas dan kelangsungan usaha bagi UMKM menjadi fokus perhatian dalam sejumlah penelitian di tingkat lokal, termasuk Fauzan et al. (2025) yang menyoroti kontribusi integrasi keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah pedesaan seperti Situbondo, yang memiliki karakteristik serupa dengan Lumajang (Fauzan et al., 2025). Penelitian mengenai legalitas usaha UMKM pangan telah banyak dibahas oleh berbagai peneliti di Indonesia. Hermanu dan Saryana (2016) menyoroti bahwa pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memahami standar sanitasi dan persyaratan teknis PIRT, sehingga dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan (Hermanu, 2016). Tirtawati et al. (2024) menyoroti tantangan pengawasan PIRT di Kabupaten Tangerang akibat perubahan regulasi yang berbasis komitmen dan keterbatasan tenaga pengawas (Tirtawati et al., 2024).

Penelitian lain oleh Permatasari et al. (2024) menegaskan pentingnya kepatuhan produsen terhadap standar BPOM dan PP terkait label pangan, meskipun masih ditemukan kekurangan pada informasi gizi dan halal (Permatasari et al., 2024). Sementara itu, beberapa studi menyoroti peran legalitas dalam membentuk kepercayaan konsumen, seperti penelitian Musaidah et al. (2024) yang menegaskan bahwa label halal dan citra merek memengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik (Musaidah & Masrohatin, 2024). Penelitian berbasis pengabdian masyarakat, seperti Dewi et al. (2023) dan Setyaningrum & Maghfiroh (2020), menekankan bahwa pendampingan teknis dapat meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar BPOM (Dewi et al., 2023). (Setyaningrum & Maghfiroh, 2020) Studi Wuryandari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pembinaan berbasis kemitraan efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui SOP dan manajemen operasional yang lebih baik (Wuryandari et al., 2023). Selain itu, penelitian Hasanah et al. (2022) Yuwana & Hasanah (2021) menyoroti pentingnya kesadaran dan literasi pelaku UMKM terhadap aspek halal sebagai bagian dari legalitas produk (Hasanah et al., 2022) (Yuwana & Hasanah, 2021).

Literature review ini menunjukkan adanya kesenjangan (research gap) antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dan kemampuan UMKM dalam memenuhinya. Temuan tersebut memperkuat urgensi penelitian pada CV Winna Sari untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kendala dalam pemenuhan izin PIRT dan BPOM berdampak pada keberlangsungan usahanya, sekaligus merumuskan solusi strategis yang relevan bagi UMKM

sejenis. CV Winna Sari adalah sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang makanan ringan dan produksi minuman siap saji. Produk-produk yang dihasilkan mencakup beragam rasa khas, seperti salak, jambu, pisang, dan markisa. Meski berskala kecil, CV Winna Sari telah melampaui tahap produksi rumahan dengan memiliki fasilitas produksi khusus berupa pabrik. Reputasi perusahaan masih dalam tahap perkembangan, dengan jangkauan pasar yang terbatas. Pemasaran produk utamanya dilakukan melalui komunikasi mulut ke mulut, sehingga eksistensi CV Winna Sari belum cukup dikenal secara luas. Namun, potensi produk dengan cita rasa unik ini memberikan peluang untuk ekspansi pasar di masa mendatang, terlebih dengan dukungan pengelolaan izin yang sesuai dan strategi pemasaran yang tepat.

Pemilihan topik penelitian ini berangkat dari pengalaman pribadi yang erat dengan CV Winna Sari. Setiap bulan Ramadan, keluarga saya rutin membeli produk minuman dari CV Winna Sari untuk dijual kembali, karena minuman tersebut memiliki cita rasa khas dan banyak diminati konsumen. Seiring berjalannya waktu, pemilik CV Winna Sari menghadapi kendala dalam pengurusan izin BPOM, yang menjadi hambatan bagi perkembangan usahanya. Beberapa bulan lalu, pemilik usaha meminta bantuan saya untuk datang ke BPOM Jember, mengingat saya berkuliah di Jember. Dari fenomena ini, muncul ketertarikan untuk meneliti lebih dalam bagaimana regulasi izin PIRT dan BPOM memengaruhi keberlanjutan usaha minuman siap minum, serta mencari solusi strategis bagi UMKM yang mengalami kendala serupa. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh pentingnya legalitas usaha sebagai prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing UMKM di sektor makanan dan minuman. Izin PIRT dan BPOM tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk akses ke ritel modern dan pasar digital. CV Winna Sari, yang berlokasi di Kabupaten Lumajang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu UMKM lokal yang telah menjalankan usaha minuman siap minum dalam skala menengah namun masih menghadapi hambatan dalam pengurusan izin legalitas produk, terutama izin BPOM.

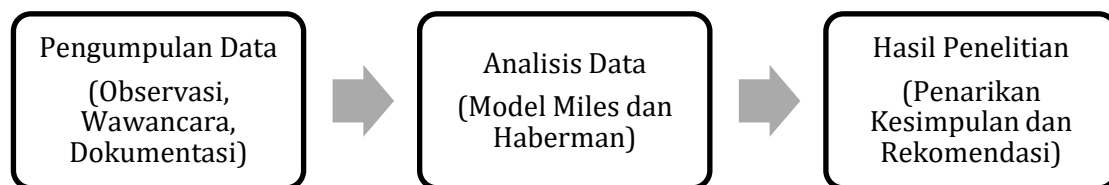
Permasalahan ini menjadi representasi dari tantangan umum yang dialami oleh pelaku UMKM di Lumajang, yang menurut data dari instansi terkait, banyak di antaranya belum memiliki legalitas produk secara lengkap meskipun kualitas produknya sudah memenuhi standar pasar. Selain itu, Kabupaten Lumajang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup tinggi di sektor agroindustri dan minuman olahan, namun belum seluruh pelaku usahanya mampu memenuhi standar regulatif yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi izin PIRT dan BPOM dalam konteks lokal serta merumuskan solusi strategis yang dapat mendukung keberlangsungan usaha sejenis, baik di Lumajang maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data faktual di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna di balik perilaku, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian tanpa mengutamakan aspek numerik. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menelaah fenomena regulasi izin PIRT dan proses pengurusan izin BPOM yang terjadi pada CV Winna Sari sebagai pelaku usaha kecil menengah di bidang produksi minuman siap minum (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Metode studi kasus digunakan agar peneliti dapat menggali secara mendetail kondisi nyata yang dihadapi oleh CV Winna Sari, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun kendala hukum yang memengaruhi

kelangsungan usahanya. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh berbentuk narasi deskriptif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Penelitian dilakukan di Jl. Raya Sidorenggo, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang merupakan lokasi operasional CV Winna Sari. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat produksi sekaligus pusat kegiatan administrasi perusahaan, sehingga peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap kegiatan produksi, legalitas usaha, dan dinamika proses perizinan. Pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dan pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu informan kunci dan informan utama (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Informan kunci adalah Bapak Winarno, selaku pemilik CV Winna Sari, yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai sejarah, struktur organisasi, serta kebijakan perusahaan. Sedangkan informan utama meliputi pihak internal dan eksternal perusahaan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha. Informan utama terdiri atas dua karyawan, yaitu Ibu Sudarmi dan Ibu Aini, serta dua konsumen, yaitu Ibu Riska dan Bapak Holil, yang memiliki pengalaman membeli sekaligus memasarkan produk minuman siap minum CV Winna Sari. Kombinasi informan tersebut diharapkan dapat memberikan data yang beragam dan saling melengkapi.



Gambar 1. Tahapan penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

- 1) Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan produksi dan operasional di CV Winna Sari. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai proses pembuatan minuman siap minum, kondisi fasilitas produksi, serta kelengkapan dokumen legalitas seperti sertifikat PIRT. Observasi juga memberikan pemahaman faktual mengenai kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses pengurusan izin BPOM.
- 2) Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pandangan, pengalaman, serta persepsi informan terhadap regulasi perizinan usaha dan dampaknya terhadap kegiatan produksi. Melalui wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen, peneliti memperoleh data yang bersifat subjektif namun kaya makna, yang membantu menjelaskan hubungan antara regulasi,

kepatuhan, dan keberlanjutan usaha.

- 3) Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan melalui bukti tertulis dan visual, seperti foto kegiatan produksi, dokumen izin usaha, serta arsip administratif yang dimiliki oleh CV Winna Sari. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap observasi dan wawancara dalam memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fiantika et al., 2022).

- 1) Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian—yakni regulasi izin PIRT, kendala pengurusan izin BPOM, dan strategi keberlanjutan usaha—yang dipertahankan.
- 2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan makna dari data yang terkumpul.
- 3) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi, yaitu penggabungan berbagai metode dan sumber data guna meningkatkan keakuratan temuan. Dua bentuk triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Fiantika et al., 2022).

- 1) Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian antar data.
- 2) Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, baik dari pihak internal (pemilik dan karyawan) maupun eksternal (konsumen), untuk menguji konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

Melalui penerapan triangulasi ini, peneliti berupaya memperoleh data yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terutama karena penelitian kualitatif sangat bergantung pada interpretasi dan keterbatasan sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian disajikan sesuai fokus utama, yaitu implementasi pengurusan izin PIRT dan BPOM pada CV Winna Sari serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

Implementasi Pengurusan Izin PIRT dan BPOM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pengurusan izin pada CV Winna Sari menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh izin PIRT sehingga produk dapat beredar di pasar lokal. Namun, pengurusan izin BPOM belum dapat dilanjutkan karena terdapat beberapa keterbatasan internal maupun eksternal. Secara internal, pemilik usaha menjelaskan bahwa fasilitas produksi belum memenuhi standar

BPOM, terutama pada aspek kebersihan, tata ruang produksi, dan tata bangunan gudang. Standar sanitasi belum terdokumentasikan secara sistematis dan ruang penyimpanan produk belum terpisah sesuai ketentuan.

Keterbatasan dana juga menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan belum mampu melakukan perbaikan sarana secara menyeluruh. Selain itu, proses administratif seperti penyusunan SOP produksi, dokumen sanitasi, dan kesesuaian label produk belum terpenuhi. Pemilik menyampaikan bahwa SOP yang diminta BPOM memerlukan format dan bukti penerapan yang belum bisa dipenuhi karena kurangnya pengetahuan teknis dan minimnya sumber daya manusia. Dari sisi eksternal, pemilik menyampaikan bahwa alur birokrasi pengurusan izin BPOM cukup panjang dan membutuhkan dokumen yang lengkap. Ketidaksiapan fasilitas internal menyebabkan proses menjadi terhambat dan memerlukan revisi berulang. Prosedur pemeriksaan dan verifikasi dari BPOM juga menuntut kesiapan sarana yang belum dimiliki perusahaan. Meski demikian, CV Winna Sari menunjukkan kesadaran akan pentingnya legalitas BPOM dan telah merencanakan strategi untuk mempersiapkan seluruh persyaratan, terutama pada perbaikan fasilitas fisik, pemenuhan standar kebersihan, dan kelengkapan dokumen. Langkah ini menjadi strategi awal untuk meningkatkan peluang keberhasilan pengurusan izin di masa mendatang.

Dampak Pengurusan Izin terhadap Keberlangsungan Usaha

Meskipun CV Winna Sari belum memperoleh izin BPOM, wawancara dengan pemilik usaha dan konsumen memberikan gambaran mengenai dampak potensial yang akan muncul setelah izin tersebut diperoleh. Dari sisi legalitas, pemilik usaha menyatakan bahwa produksi minuman belum dapat dijalankan secara penuh sebelum izin BPOM diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas memiliki peran strategis dalam memastikan keteraturan operasional dan kepastian hukum bagi perusahaan. Dari sisi kepercayaan konsumen, hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen menilai pentingnya izin resmi dalam menentukan keputusan pembelian. Konsumen merasa lebih yakin terhadap produk yang memiliki legalitas jelas, terutama untuk dikonsumsi harian atau dijual kembali pada momen tertentu seperti bulan Ramadan. Label izin BPOM dianggap meningkatkan rasa aman, kualitas, dan kredibilitas produk. Dari sisi pemasaran, legalitas BPOM dipandang sebagai kunci utama untuk memperluas distribusi ke ritel modern dan platform perdagangan daring berskala nasional. Dengan izin tersebut, peluang kerja sama dengan mitra distribusi menjadi lebih terbuka, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan daya saing perusahaan. Pemilik CV Winna Sari menegaskan bahwa jika izin BPOM berhasil diperoleh, perusahaan berharap jangkauan pemasaran semakin luas dan tingkat kepercayaan konsumen semakin meningkat, sehingga keberlangsungan usaha dapat lebih terjamin.

Analisis Temuan Berdasarkan Model Miles dan Huberman

Melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, ditemukan bahwa hambatan utama pengurusan izin BPOM terletak pada:

- 1) Kesiapan sarana produksi (sanitasi, tata ruang, fasilitas pendukung).
- 2) Kelengkapan dokumen administratif.
- 3) Pemahaman prosedur regulasi yang masih terbatas.

Sementara itu, manfaat kepemilikan izin BPOM sangat jelas, yaitu peningkatan legalitas usaha, penguatan kepercayaan konsumen, serta perluasan pasar. Kepemilikan izin juga memperkuat aspek *business sustainability* dengan memperhatikan tiga dimensi

utama: profit, people, dan planet. (Prabawani, 2016) Dari sisi profit, izin membuka peluang peningkatan penjualan dan kerja sama bisnis. Dari sisi people, izin menjamin keamanan konsumen melalui standar produksi yang jelas. Sedangkan dari sisi planet, penerapan standar BPOM mendorong perusahaan menjaga kebersihan lingkungan dan tata kelola limbah yang lebih baik. Konsumen dan pemilik perusahaan sama-sama memiliki harapan bahwa setelah izin BPOM diperoleh, produk CV Winna Sari dapat lebih luas jangkauannya dan lebih dipercaya masyarakat. Konsumen berharap kualitas dan keamanan produk tetap terjaga dengan rasa yang konsisten, kemasan rapi, dan label izin yang jelas. Harapan ini mencerminkan pentingnya legalitas dalam menciptakan loyalitas pelanggan dan menjaga keberlanjutan usaha.

Sinergi antara kebijakan publik dan keberlanjutan bisnis menjadi faktor penting bagi keberhasilan UMKM. (Septiana et al., 2023) Regulasi pemerintah memastikan keamanan dan mutu produk, sedangkan prinsip keberlanjutan bisnis mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks CV Winna Sari, sinergi ini terlihat dari upaya perusahaan untuk memenuhi standar BPOM sekaligus mempertahankan praktik usaha yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengurusan izin PIRT dan BPOM bukan hanya langkah administratif, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Legalitas memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang ekspansi pasar. Sementara penerapan prinsip keberlanjutan memastikan bahwa pertumbuhan usaha berlangsung secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perizinan di CV Winna Sari menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara kebijakan publik dan praktik bisnis dapat menciptakan usaha kecil yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bahwa kendala utama yang menghambat pengurusan izin BPOM pada CV Winna Sari meliputi ketidaksiapan fasilitas produksi, belum terpenuhinya dokumen administratif seperti SOP dan standar sanitasi, serta terbatasnya pemahaman teknis terhadap prosedur regulasi, sehingga meskipun izin PIRT telah dimiliki, perusahaan belum mampu memenuhi persyaratan BPOM. Temuan ini menunjukkan bahwa legalitas BPOM memiliki peran penting bagi peningkatan kepercayaan konsumen, kepastian hukum, serta perluasan akses pasar, sehingga untuk mencapai keberlanjutan usaha diperlukan upaya strategis berupa perbaikan sarana produksi, penyusunan dokumen sesuai standar, peningkatan kapasitas SDM, dan pendampingan teknis berkelanjutan agar CV Winna Sari dapat memenuhi ketentuan regulasi dan bersaing secara lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, N., Noviana, H., Pramudita, N. A., Amalia, P. R., & Yuliana, V. (2024). *Pemberdayaan masyarakat Warangan melalui inovasi pangan singkong sebagai potensi lokal Empowerment of the Warangan community through cassava food innovation as local potential*. 7(2), 187–195.
- Aprilianti, I., & Amanta, F. (2020). Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia. In *Center for Indonesian Policy Studies* (Issue 28).
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & D., B. S. (2018). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM

Press.

- Dewi, N. S. D., Putri, D. A. P. A. G., Wardani, K. D. K. A., & Indrashwara, D. C. (2023). Pendampingan Umkm Desa Sulahan Dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan Izin Edar BPOM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 461. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i3.1790>
- Fauzan, Pratiwi, A., Mauliyah, N. I., & Farooqi, I. Al. (2025). *Integration Of Islamic Social Finance For Sustainable Economic Development In The Rural Areas Of Situbondo Regency, East Java, Indonesia*. 7(1), 98–109.
- Fiantika, F. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.
- Hasanah, H., Mauliyah, N. I., & Suprianik. (2022). Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Summersari Jember. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 17–21. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.13>
- Hermanu, B. (2016). *Implementasi izin edar produk pirt melalui model pengembangan sistem keamanan pangan terpadu*. 1945(1), 424–435.
- Hermanu, B., & Saryana, S. (2016). Implementasi Ijin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Bangun Rekaprima*, 2(2), 424–435. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v2i2.452>
- Husna, A. (2022). *Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Krisna, A. E. (2024). *Transformasi UMKM Melalui Industri Kreatif: Pendekatan Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Inovasi*. 3(4).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*.
- Musaidah, A., & Masrohatin, S. (2024). The influence of halal label , price , and brand image on cosmetic product purchase KHAS Jember decisions among female students at FEBI UIN. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 347–362.
- Neng Frida. (2020). Analisis Strategi Mempertahankan dan Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 Serta Mengetahui Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 84–94. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i3.61>
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Permatasari, B. A., Anjaini, J., & Setiyaningsih, L. (2024). Analisis Kepatuhan Regulasi Keamanan Pangan Produk Olahan Perikanan Melalui Identifikasi Label Kemasan. *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, 15(2), 207–220.
- Prabawani, B. (2016). *Business Sustainability dan Peran Triple Helix dalam Industri* (Issue October 2016).
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK : TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

- Setyaningrum, D., & Maghfiroh, A. M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Jamu Gendong Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 234–245. <https://doi.org/10.29407/ja.v3i2.13796>
- Tirtawati, D., Fanani, M. Z., Jumiono, A., & Haris, H. (2024). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan pada Penerbitan Izin Edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96–103. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.10844>
- Windiasasri, T., Zahari, Y. K., Mayasni, Y., & Putra, R. (2024). Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan Virgin Coconut Oil (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur. 8, 4222–4233.
- Wuryandari, N. E. R., Anjarwati, S., Purwanto, S., Sugeng, M., Perkasa, D. H., & Melly. (2023). Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan: Solusi Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 387–396.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>